

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KETERBUKAAN PEMERINTAH SEKTOR KEADILAN

PBHI · ASOSIASI LBH APIK INDONESIA · IJRS · YLBHI · LBH ACEH · LBH APIK JAKARTA · LBH JAKARTA · LBH PAPUA · LBH BANDUNG · LBH MASYARAKAT
Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320, telp (021) 3929840 (hunting), fax (021) 31930140, Email: info@ylbhi.or.id

Jakarta, 14 Juli 2021

Nomor : 01/SK/Koalisi-OGI-Keadilan/VII/2021
Perihal : Permohonan Perkembangan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional
Keterbukaan Pemerintah Sektor Keadilan

Kepada Yang Terhormat,
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
c.q. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
di-
Jakarta

Dengan hormat,

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Terbuka Sektor Keadilan merupakan gabungan organisasi yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Asosiasi LBH APIK Indonesia, Institute for Judicial Research Society (IJRS), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH Aceh, LBH APIK Jakarta, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Bandung dan LBH Masyarakat, yang bekerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Sekretariat Open Government Indonesia, dan Kementerian/Lembaga Pemerintah terkait, untuk mendorong Pemerintahan Terbuka, khususnya di sektor keadilan.

Pada Desember 2020 lalu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia Periode 2020-2022, yang disusun bersama antara Koalisi Masyarakat Sipil dengan Kementerian/Lembaga, dimana salah satu komitmen di sektor keadilan antara lain:

No.	Komitmen	Indikator Capaian	Kementerian/Lembaga Penanggungjawab
6	Peraturan Pelaksana Untuk Asesmen Pemenuhan Kebutuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Setiap Tahapan Acara Peradilan.	Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan.	Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
7	Penguatan Portal Informasi Bantuan Hukum	Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
8	Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum	Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH).	Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
		Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.	Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
		Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum.	Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
9	Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban	Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban	Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KETERBUKAAN PEMERINTAH SEKTOR KEADILAN

PBHI · ASOSIASI LBH APIK INDONESIA · IJRS · YLBHI · LBH ACEH · LBH APIK JAKARTA · LBH JAKARTA · LBH PAPUA · LBH BANDUNG · LBH MASYARAKAT
Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320, telp (021) 3929840 (hunting), fax (021) 31930140, Email: info@ylbhi.or.id

		terutama kelompok rentan dan perempuan.	
		Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
10	Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi	Terlaksananya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
		Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap mediasi, adjudikasi non litigasi, serta tahap keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).	Kementerian Hukum dan HAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
16	Pelibatan Masyarakat Sipil Dalam Pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Untuk Mendorong Efektivitas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Yang Berat	Terlaksananya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam penyusunan RUU KKR.	Kementerian Hukum dan HAM

Sehubungan dengan adanya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan Rencana Aksi yang dilakukan setiap enam bulan sekali, untuk itu kami memohon kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan informasi terkait perkembangan pelaksanaan komitmen Rencana Aksi dimaksud, sesuai indikator capaian yang telah ditetapkan, serta memohon agar kiranya dapat dilibatkan di dalam segala proses yang dilakukan terkait pelaksanaan Rencana Aksi tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Atas nama Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keterbukaan Pemerintah Sektor Keadilan



Febi Yonesta
Pengurus Yayasan LBH Indonesia